

BAB I

PENDAHULUAN

Bab pertama penelitian ini menjelaskan mengenai gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas sesuai dengan judul penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan.

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia berupaya untuk memajukan perekonomian negara yaitu dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi negara Indonesia. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu cara untuk memajukan perekonomian negara Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan produksi barang dan jasa sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan merupakan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan memiliki nilai tambahan dari produksi barang dan jasa dapat dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu. Menurut Budiarto dan Dewi (2015), Produk Domestik Regional Bruto diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja di daerah dengan merata sehingga produktivitas pendapatan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan meningkat. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2021 disajikan dalam data penelitian di halaman lampiran 1.

Berdasarkan tabel Produk Domestik Regional Bruto dapat dilihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan di Kabupaten/Kota Provinsi Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2021 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan Kabupaten/Kota DKI Jakarta menduduki posisi tertinggi. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan di Kabupaten/Kota DKI Jakarta Provinsi Indonesia pada tahun 2021 yaitu sebesar 1.856.301.410 milyar rupiah sedangkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan di Kabupaten/Kota Jambi pada tahun 2018 menduduki posisi terendah yaitu sebesar 1.429.000.002 milyar rupiah.

Menurut Suharto dan Dharmala (2016), faktor penting yang menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu tenaga kerja yang meningkat dan tersedia baik dari aspek keahlian dan keterampilan angkatan kerja yang bekerja dengan melaksanakan proses produksi, dan distribusi barang dan jasa, serta mengembangkan pemasaran. Tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan keterampilan merupakan aspek penting untuk membentuk suatu industri. Seiring dengan itu, jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan meningkat akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berskala nasional. Data Jumlah Angkatan Kerja dan Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu Tahun 2010-2021 disajikan dalam data penelitian di halaman lampiran 1.

Berdasarkan tabel Angkatan Kerja dapat dilihat bahwa, jumlah angkatan kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2021 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten/Kota Provinsi

Indonesia tergolong cukup tinggi karena jumlah angkatan kerja di beberapa daerah meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2016 Kabupaten/Kota Bengkulu meningkat paling tinggi yaitu sebesar 7.511.006 jiwa sedangkan pada tahun 2011 jumlah angkatan kerja paling rendah yaitu Kabupaten/Kota Papua Barat sebesar 342.888 jiwa.

Menurut Mankiw (2009), selain jumlah angkatan kerja yang bekerja, upah minimum provinsi juga diharapkan dapat meningkatkan angka Produk Domestik Regional Bruto. Upah merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam menggunakan tenaga kerja. Upah minimum provinsi telah ditentukan oleh pemerintah provinsi, kecil atau besarnya jumlah upah minimum telah ditentukan oleh pemerintah provinsi yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para tenaga kerja dan kesejahteraan para tenaga kerja. Data Upah Minimum Provinsi Kabupaten/Kota Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2021 disajikan dalam data penelitian di halaman lampiran 1.

Berdasarkan tabel upah minimum provinsi dapat dilihat bahwa, upah minimum provinsi di Kabupaten/Kota Provinsi Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2021 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Upah minimum provinsi di Kabupaten/Kota Provinsi Indonesia mengalami kenaikan cukup tinggi karena upah minimum provinsi di beberapa daerah meningkat dari tahun ke tahun. Upah minimum provinsi di Kabupaten/Kota DKI Jakarta pada tahun 2021 di posisi tertinggi yaitu sebesar 4.416.187 rupiah sedangkan upah minimum provinsi di Kabupaten/Kota Aceh pada tahun 2017 di posisi terendah yaitu sebesar 2.500 rupiah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh upah minimum provinsi terhadap produk domestik regional bruto provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2021?
2. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap produk domestik regional bruto provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh upah minimum provinsi terhadap produk domestik regional bruto provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap produk domestik regional provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2021.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Pemerintah, sebagai salah satu bahan informasi untuk membuat kebijakan dengan mengatasi masalah ketenagakerjaan, menetapkan upah minimum berdasarkan kehidupan hidup layak, dan meningkatkan produk domestik regional bruto provinsi di Indonesia.

2. Pembaca, menambah referensi dan pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan dan kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi angka produk domestik regional bruto provinsi di Indonesia.
3. Peneliti, sebagai referensi, pengetahuan, dan data tambahan.

1.5. Hipotesis

Berdasarkan penelitian terdahulu dan rumusan masalah, maka akan dijelaskan hubungan antara variabel-variabel terkait untuk menguji ada atau tidak pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Hasil hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga bahwa Upah Minimum Provinsi memiliki pengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2021.
2. Diduga bahwa Tenaga Kerja memiliki pengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2021.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dan terdiri dari lima bab diterangkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori yang mendukung penelitian ini tentang pengaruh upah minimum provinsi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi

provinsi di Indonesia, studi terkait, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan sumber data, model penelitian, alat analisis, uji asumsi klasik, uji statistik, dan definisi operasional variabel.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis data, hasil penelitian yang diperoleh, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri kesimpulan dari seluruh bab yang sudah dirangkum dan saran yang diajukan untuk pemerintah.

